MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 348/DJMT.1/ST.KP7.1/VII/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka mempercepat optimalisasi terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya khususnya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 335/DJMT/KEP/HK.1.2.5/VII/2025 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Agus Abdur Rahman, S.H., M.H./ 198208022009041002, Pembina (IV/a), Hakim Yustisial;
2. Retno Ariyani, S.H., M.H./ 198403072008052002, Pembina (IV/a), Hakim Yustisial.

Untuk : Mengikuti kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Hotel Aryaduta Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 23 sd. 25 Juli 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara